

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Pada saat Timor Leste berada dalam pangkuan ibu pertiwi, Timor Leste telah menorehkan sejarah yang tidak sedikit bagi sejarah ketatanegaraan bangsa Indonesia. Mata pencaharian penduduk Timor Leste sebagian besar adalah berladang, yaitu dengan cara bercocok tanam secara tradisional atau bahkan masih primitive dan berpindah-pindah dari hutan yang satu ke hutan yang lain.

Proses sejarah yang panjang dan sering diwarnai dengan pertentangan antar partai yang berkuasa dialami oleh rakyat Timor Leste. Sehingga pada tanggal 17 Juli 1976 wilayah Timor Leste secara resmi dan sah berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi Provinsi yang ke-27. Hal ini diperkuat dengan UU No. 7 tahun 1976 dan Tap MPR No.VI/MPR/1978.

Keinginan rakyat Timor Leste untuk menentukan nasibnya dengan berintegrasi kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebenarnya apabila kita kaji adalah tidak bertentangan dengan Piagam Hak Asasi Manusia yang dideklarasikan PBB pada tahun 1948 dan sesuai dengan konstitusi negara Indonesia.

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, integrasi Timor Leste ke Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menguntungkan bagi Indonesia karena wilayah Timor Leste berupa pegunungan dan merupakan daerah yang miskin, tandus, penduduknya terbelakang dan bodoh dibandingkan dengan penduduk daerah lain. Akan tetapi bagaimanapun keadaan Timor Leste pada saat itu

Pemerintah Republik Indonesia menerima secara terbuka keinginan rakyat Timor Leste untuk berintegrasi dengan Indonesia.

Penerimaan itu tentunya dengan berbagai alasan dan pertimbangan yang mendasari. Pertama adalah bahwa dari perspektif sejarah ada persamaan nasib antara keduanya sebagai bangsa yang pernah dijajah dan tertindas. Alasan kedua adalah dilihat dari segi geografis letak keduanya saling berdekatan, bahkan ada bagian wilayah Timor Leste yang masuk kedalam wilayah Indonesia dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), ketiga merupakan alasan utama adalah dari segi politik untuk memperluas wilayahnya.

Usaha dan keinginan rakyat Timor Leste untuk merdeka mendapatkan tanggapan positif dari pemerintah pada masa pemerintahan Burhanuddin Jusuf Habibie. Dalam masa pemerintahan yang singkat itu, BJ Habibie melalui Menteri Luar Negeri Ali Alatas menawarkan dua pilihan atau opsi bagi rakyat Timor Leste pada tanggal 27 Januari 1999. Opsi pertama adalah pemberian status khusus dengan otonomi luas sebagai penyelesaian akhir persoalan Timor Leste. Opsi kedua adalah jika opsi pertama tersebut gagal dan ditolak oleh rakyat Timor Leste maka pemerintahan Indonesia akan memerintahkan para wakil rakyat hasil pemilu 1999 untuk mempertimbangkan kemungkinan pelepasan Timor Leste melalui sidang umum MPR 1999.

Dua opsi yang ditawarkan oleh pemerintah Habibie tersebut merupakan kebijakan yang tidak terduga dan sangat mengejutkan, baik bagi masyarakat domestik maupun internasional. Ditingkat lokal Timor Leste, keluarnya opsi dari pemerintah tersebut disambut secara baik oleh kelompok pro-kemerdekaan yang

sering disebut sebagai kelompok pro-referendum atau anti-integrasi karena kebijakan tersebut membuka peluang bagi terwujudnya Timor Leste yang merdeka, berdaulat, dan terlepas dari kekuasaan Indonesia ataupun Portugal. Bagi rakyat yang pro-integrasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya opsi kedua dirasa sangat mengecewakan dan merupakan langkah yang terburu-buru. Akan tetapi dalam suatu jajak pendapat yang diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timor Leste lebih memilih opsi kedua yang ditawarkan oleh pemerintah sehingga terbentuk negara Timor Leste yang merdeka sampai sekarang.

Proses integrasi Timor Leste ke Indonesia sebenarnya membawa dilema bagi pemerintah Republik Indonesia. Pada satu sisi Pemerintah Republik Indonesia menyambut baik dan menerima keinginan rakyat Timor Leste untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi pada sisi lainnya Pemerintah Republik Indonesia mendapat sikap tidak bersahabat dan kecaman dari dunia Internasional. Kecaman pemerintah Portugal membekukan hubungan diplomatik dengan pemerintah Republik Indonesia secara sepihak pada tanggal 7 Desember 1975.

Pasca Timor Leste berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui jajak pendapat yang diselenggarakan oleh UNAMET (30 Agustus 1999) dan resmi merdeka (20 Mei 2002), pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang berkepentingan untuk membina hubungan bilateral dengan dunia Timor Leste. Sesuai dengan perkembangan zaman, hubungan bilateral tidak hanya berfokus pada bidang formal tetapi juga dalam

bidang non formal, seperti bidang ekonomi, perdagangan, kemanusiaan dan sosial, maka oleh karena itu kedua negara tidak dapat mengesampingkan sejarah yang terjadi pada masa lalu.

Kemerdekaan Timor Leste meninggalkan permasalahan bagi pemerintah Republik Indonesia yang memerlukan penyelesaian secara serius karena hal ini berpengaruh terhadap hubungan antara kedua negara di masa depan. Permasalahan-permasalahan yang muncul antara lain adalah mengenai pengungsi, status kewarganegaraan, batas wilayah, dan aset pemerintah Republik Indonesia di Timor Leste. Sampai saat ini banyak pengungsi yang berasal dari bekas propinsi Timor Leste yang masih bertahan dalam kamp-kamp pengungsian di wilayah perbatasan antara Timor Leste dan Timor Barat. Keberadaan mereka menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah Daerah yang bersangkutan disamping menjadi masalah bagi pemerintah pusat.

Secara khusus masalah Timor Leste menarik untuk dikaji dengan beberapa alasan sebagai berikut: pertama, setelah Timor Leste dinyatakan secara resmi telah berintegrasi dengan Indonesia, masalah ini lebih banyak menjadi sorotan negara luar dan dunia internasional dibanding oleh masyarakat dalam negeri sendiri.

Masalah ini lebih dikarenakan adanya suara-suara sumbang dan kecaman-kecaman didalam menanggapi masalah tersebut. Kedua, masalah ini juga tergolong masalah internasional karena masalah tersebut cukup menyita perhatian pemerintah Indonesia dengan waktu yang relatif panjang serta masih ditambah dengan Portugal sebagai bekas penjajah atau penguasa memasukkan persoalan

Timor Leste kedalam suatu agenda PBB untuk dapat diperdebatkan sebagai masalah dekolonisasi.

Adapun Alasan lain yang mendorong penulis untuk mengkaji permasalahan ini adalah Karena studi ini berkaitan dengan hubungan bilateral antara pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Timor Leste pasca kemerdekaan Timor Leste. Studi ini juga mencoba untuk lebih menggali masalah Timor Leste dari aspek historis yang berhubungan dengan peristiwa kemerdekaan dan lepasnya Timor Leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia serta hubungan kerja sama antara kedua negara pasca kemerdekaan Timor Leste.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hubungan kerjasama antara Republik Indonesia dan Timor Leste pasca kemerdekaan Timor Leste tahun 2002-2015
2. Bentuk kerjasama antara Republik Indonesia dengan Timor Leste pasca kemerdekaan tahun 2002-2015
3. Hambatan Republik Indonesia dalam menjalin hubungan kerjasama dengan Timor Leste pasca kemerdekaan tahun 2002-2015

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka penelitian ini dibatasi pada masalah mengenai “Hubungan Kerjasama Indonesia Dengan Timor Leste Pasca Kemerdekaan Timor Leste tahun 2002-2015”

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hubungan kerjasama antara Republik Indonesia dan Timor Leste pasca kemerdekaan Timor Leste tahun 2002-2015?
2. Apa saja bentuk kerjasama antara Republik Indonesia dengan Timor Leste pasca kemerdekaan tahun 2002-2015?
3. Apa hambatan Republik Indonesia dalam menjalin hubungan kerjasama dengan Timor Leste pasca kemerdekaan tahun 2002-2015?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan kerjasama antara Republik Indonesia dengan Timor Leste pasca kemerdekaan Timor Leste tahun 2002-2015
2. Untuk mengetahui bentuk kerjasama antara Republik Indonesia dengan Timor Leste pasca kemerdekaan Timor Leste tahun 2002-2015
3. Untuk mengetahui hambatan Republik Indonesia dalam menjalin hubungan kerjasama dengan Timor Leste pasca kemerdekaan Timor Leste tahun 2002-2015

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari diadakannya penelitian ini adalah:

1. Dapat bermanfaat bagi masyarakat dan terutama mahasiswa untuk menambah wawasan mengenai hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Timor Leste pasca kemerdekaan Timor Leste tahun 2002-2015.
2. Dapat memberikan sumber rujukan untuk melihat hubungan kerja sama antara dua negara pasca kemerdekaan Timor Leste tahun 2002-2015.
3. Memberikan wawasan kepada peneliti tentang penulisan sebuah karya tulis ilmiah

